

**STRATEGI  
PEMBERANTASAN JUDI  
ONLINE DI LINGKUNGAN  
KANTOR: STUDI KASUS  
PEMERIKSAAN  
HANDPHONE PEGAWAI DI  
KANTOR IMIGRASI KELAS  
II TPI MIMIKA**

*STRATEGY FOR ERADICATING  
ONLINE GAMBLING IN THE  
OFFICE ENVIRONMENT: CASE  
STUDY OF MOBILE PHONE  
INSPECTION OF EMPLOYEES  
AT THE CLASS II TPI MIMIKA  
IMMIGRATION OFFICE*

**Billy Cahyadi**<sup>1</sup>  
andrianusbagas7@gmail.com  
Analisis Keimigrasian  
Politeknik Imigrasi

**Andrianus Bagas Wahyu  
Putranto**<sup>2</sup>  
bcahyadi2023@gmail.com  
Analisis Keimigrasian  
Politeknik Imigrasi

Article history

Received : 21-04-2024  
Revised : 18-05-2024  
Accepted : 28-05-2024

**Abstrak**

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak signifikan pada perilaku perjudian, dengan judi online menjadi masalah serius yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi, bahkan merambah ke lingkungan kerja pemerintah. Penelitian ini mengeksplorasi judi online di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pemeriksaan handphone yang diterapkan sebagai langkah preventif. Menggunakan pendekatan etnografi, termasuk observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam mengurangi penggunaan handphone untuk keperluan pribadi dan meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online di kalangan pegawai. Sebagian besar pegawai mendukung kebijakan ini, mengakui pentingnya untuk integritas dan produktivitas di tempat kerja, namun beberapa menyoroti perlunya sosialisasi yang lebih baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan ini efektif, diperlukan strategi komprehensif termasuk program edukatif, dukungan psikologis, dan pengawasan yang lebih ketat.

**Kata kunci:** Judi online, kebijakan kantor, studi etnografi, pemeriksaan handphone, integritas pegawai.

**Abstract**

*The rapid development of information and communication technology has significantly impacted gambling behavior, with online gambling emerging as a serious issue affecting social and economic stability, even penetrating government workplaces. This study explores online gambling at the Class II TPI Mimika Immigration Office and evaluates the effectiveness of a mobile phone check policy implemented as a preventive measure. Using an ethnographic approach, including participatory observation, in-depth interviews, and document analysis, the findings indicate that the policy effectively reduced non-work-related phone usage and increased awareness about the dangers of online gambling among employees. While most employees supported the policy, recognizing its importance for workplace integrity and productivity, some emphasized the need for better dissemination. The study concludes that while the policy is effective, comprehensive strategies including educational programs, psychological support, and stricter supervision are necessary.*

**Keywords:** Online gambling, workplace policy, ethnographic study, mobile phone check, employee integrity.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perilaku perjudian. Judi online, yang sebelumnya tidak terbayangkan, kini menjadi masalah serius yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Akses mudah ke situs judi online melalui perangkat elektronik seperti smartphone dan komputer telah membuat perjudian lebih tersebar luas dan sulit dikendalikan. Judi online tidak hanya menargetkan masyarakat umum, tetapi juga telah merambah ke lingkungan kerja, termasuk kantor pemerintahan.

Judi online menawarkan berbagai permainan dan taruhan yang dapat diakses dengan cepat dan mudah, tanpa perlu pergi ke tempat perjudian fisik. Hal ini meningkatkan risiko kecanduan dan kerugian finansial yang besar bagi individu yang terlibat. Bagi pegawai pemerintahan, terlibat dalam judi online bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat mengganggu kinerja dan reputasi institusi tempat mereka bekerja. Judi online di kalangan pegawai pemerintahan menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada produktivitas kerja, moral, dan integritas institusi.

Menghadapi maraknya judi online di lingkungan kerja, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika mengambil langkah tegas dengan melakukan pemeriksaan handphone kepada seluruh pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan pada Jumat, 12 Juli, di bawah pimpinan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanim Mimika. Pemeriksaan dilakukan secara mendadak di sela-sela apel sore untuk memastikan pegawai tidak memiliki kesempatan untuk menyembunyikan aktivitas judi online mereka.

Kepala Kantor Imigrasi Mimika, Mohamad Agus Sofani, menyatakan bahwa tujuan dari pemeriksaan handphone ini adalah untuk meningkatkan kesadaran para pegawai tentang bahaya judi online. Diharapkan dengan adanya pemeriksaan ini, para pegawai akan menyadari risiko dan konsekuensi negatif dari terlibat dalam aktivitas judi online sehingga bisa dihindari oleh seluruh masyarakat, khususnya pegawai dan PPNPN di Kantor Imigrasi Mimika. Langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif yang lebih luas untuk menjaga integritas dan produktivitas pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat.

Judi online di lingkungan kerja memiliki dampak yang sangat merugikan. Pegawai yang terlibat dalam judi online cenderung menghabiskan waktu yang

seharusnya digunakan untuk bekerja dengan bermain judi. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas dan keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Pegawai yang kecanduan judi online juga mungkin mengalami kelelahan mental dan fisik yang mempengaruhi kinerja mereka. Judi online sering kali menyebabkan kerugian finansial yang besar. Pegawai yang mengalami kerugian mungkin mencoba menutupi kerugian tersebut dengan cara-cara yang tidak etis, seperti korupsi atau penyalahgunaan fasilitas kantor. Hal ini tidak hanya merugikan pegawai secara individu, tetapi juga dapat merusak reputasi dan integritas institusi tempat mereka bekerja. Kecanduan judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Pegawai yang mengalami tekanan mental akibat judi online mungkin tidak dapat bekerja dengan efektif dan bisa mengganggu dinamika kerja tim. Stres yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik, seperti hipertensi dan gangguan tidur. Keterlibatan pegawai dalam judi online dapat mempengaruhi moral dan etika kerja. Pegawai yang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti judi online menunjukkan kurangnya integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai profesionalisme. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif dan mengurangi kepercayaan rekan kerja serta atasan terhadap pegawai tersebut.

Untuk mengatasi masalah judi online, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi dan undang-undang yang melarang aktivitas perjudian dalam bentuk apa pun. Beberapa regulasi yang relevan antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas judi online melalui pengawasan dan penegakan hukum di ranah digital. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 KUHP mengatur tentang larangan dan sanksi terhadap perjudian. Sanksi bagi pelanggar bisa berupa pidana penjara maupun denda. KUHP juga mengatur larangan penyelenggaraan perjudian dalam bentuk apa pun, termasuk judi online. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam menangani masalah perjudian, baik dalam bentuk konvensional

maupun digital. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini memperkuat pengawasan terhadap konten ilegal, termasuk perjudian online, dan menetapkan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik untuk menanggulangi konten yang melanggar hukum. Penyedia layanan internet dan platform digital memiliki tanggung jawab untuk memblokir akses ke situs-situs judi online. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran judi online dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

Implementasi pemeriksaan handphone di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika merupakan langkah preventif yang efektif dalam memberantas judi online di kalangan pegawai. Langkah ini menunjukkan komitmen pimpinan kantor untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pengaruh negatif judi online. Pemeriksaan handphone dilakukan secara mendadak untuk memastikan bahwa pegawai tidak memiliki kesempatan untuk menyembunyikan aktivitas judi online mereka. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pegawai yang mungkin terlibat dalam judi online. Dengan mengetahui bahwa ada kemungkinan pemeriksaan handphone sewaktu-waktu, pegawai diharapkan akan lebih berhati-hati dan menghindari judi online. Langkah ini juga dapat menjadi contoh bagi instansi lain untuk melakukan tindakan serupa dalam upaya memberantas judi online di lingkungan kerja.

Untuk mengatasi masalah judi online, kesadaran dan pendidikan tentang bahaya judi online sangat penting. Pegawai perlu diberi pemahaman tentang risiko dan konsekuensi negatif dari judi online, serta cara menghindari kecanduan judi online. Program-program edukatif dan sosialisasi tentang bahaya judi online dapat membantu meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi yang diperlukan untuk menghindari aktivitas tersebut. Kesadaran yang tinggi tentang bahaya judi online akan membantu pegawai dalam mengambil keputusan yang bijak dan menghindari keterlibatan dalam aktivitas ilegal tersebut. Pendidikan tentang bahaya judi online juga dapat mencakup informasi tentang konsekuensi hukum dan sosial dari terlibat dalam judi online, serta memberikan dukungan bagi pegawai yang mungkin membutuhkan bantuan untuk mengatasi kecanduan judi online.

Mengapa langkah-langkah ini perlu diambil dan ditindaklanjuti? Karena judi online bukan hanya sekadar masalah pribadi yang dapat diselesaikan dengan nasihat atau peringatan. Ini adalah masalah sistemik yang merusak fondasi etika dan moral di

tempat kerja. Ketika seorang pegawai terlibat dalam judi online, mereka tidak hanya menempatkan diri mereka pada risiko finansial dan psikologis, tetapi juga membahayakan reputasi dan efisiensi institusi tempat mereka bekerja. Judi online dapat mengarah pada berbagai bentuk penyimpangan profesional, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan yang merugikan seluruh organisasi.

Selain itu, toleransi terhadap judi online dapat menciptakan budaya permisif di lingkungan kerja, di mana pelanggaran etika lainnya mungkin dianggap sepele. Ini bisa memicu rantai masalah yang lebih besar, mengakibatkan kerugian jangka panjang bagi institusi dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Oleh karena itu, tindakan preventif seperti pemeriksaan handphone dan program pendidikan yang intensif sangat diperlukan untuk membangun kesadaran, menanamkan disiplin, dan memastikan bahwa pegawai tetap berpegang pada standar etika yang tinggi.

Implementasi kebijakan ini juga mencerminkan komitmen institusi terhadap penegakan hukum dan regulasi yang ada, serta menunjukkan ketegasan dalam menjaga integritas dan profesionalisme di lingkungan kerja. Dengan memastikan bahwa setiap pegawai memahami dan mematuhi peraturan yang melarang judi online, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, aman, dan beretika. Inilah alasan utama mengapa kasus ini perlu ditindaklanjuti dengan serius dan konsisten, demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh pegawai dan institusi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk memahami dan menganalisis fenomena judi online di lingkungan kerja, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika. Etnografi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami perilaku, nilai, dan budaya dari suatu kelompok atau komunitas tertentu melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Metode ini sangat cocok untuk menggali pemahaman mendalam tentang interaksi sosial dan dinamika yang terjadi di dalam lingkungan kerja terkait dengan judi online.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, Papua, Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada langkah preventif yang telah

diambil oleh kantor ini dalam memberantas judi online di kalangan pegawai melalui pemeriksaan handphone. Kantor ini menyediakan konteks yang relevan dan memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung implementasi kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap pegawai dan lingkungan kerja.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah pegawai dan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) yang bekerja di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika. Subjek penelitian dipilih secara purposive sampling untuk memastikan bahwa mereka yang diwawancarai memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait dengan masalah judi online di lingkungan kerja.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

#### **1. Observasi Partisipatif**

Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari di kantor, mengamati interaksi sosial dan perilaku pegawai. Observasi dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi indikasi judi online dan dampaknya terhadap kinerja pegawai. Peneliti mencatat secara rinci segala aktivitas yang terkait dengan penelitian, termasuk reaksi dan tanggapan pegawai terhadap pemeriksaan handphone yang dilakukan oleh pihak kantor.

#### **2. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam dilakukan dengan pegawai dan PPNPN yang dipilih sebagai subjek penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang bahaya judi online, pengalaman pribadi terkait judi online, dan pandangan mereka terhadap kebijakan pemeriksaan handphone. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi yang lebih mendalam.

#### **3. Analisis Dokumen**

Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan kebijakan dan regulasi judi online, termasuk peraturan internal kantor dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Analisis dokumen ini membantu memahami dasar hukum dan kebijakan yang mendasari langkah-langkah preventif yang diambil oleh kantor.

### **Prosedur Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

#### **1. Persiapan Penelitian**

Peneliti mempersiapkan segala kebutuhan penelitian, termasuk perijinan, alat observasi, dan panduan wawancara. Peneliti juga melakukan studi literatur untuk memahami konteks masalah dan kerangka teoretis yang relevan.

#### **2. Pelaksanaan Observasi dan Wawancara**

Peneliti memulai dengan melakukan observasi partisipatif di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, mengikuti aktivitas sehari-hari pegawai dan mencatat segala hal yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan subjek penelitian yang telah dipilih. Wawancara direkam dan ditranskrip untuk keperluan analisis data.

#### **3. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan analisis dokumen dianalisis secara tematik. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data dan menghubungkannya dengan kerangka teoretis yang telah disusun. Analisis data dilakukan secara iteratif, dengan peneliti kembali ke lapangan untuk mengkonfirmasi temuan jika diperlukan.

#### **4. Pelaporan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian disusun dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif. Laporan ini mencakup deskripsi mendalam tentang fenomena judi online di lingkungan kerja, analisis kebijakan pemeriksaan handphone, dan rekomendasi untuk tindakan preventif yang lebih efektif.

### **Validitas dan Reliabilitas**

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti menerapkan beberapa strategi berikut:

#### **1. Triangulasi**

Peneliti menggunakan berbagai sumber data (observasi, wawancara, dan dokumen) untuk mengkonfirmasi temuan. Triangulasi ini membantu memastikan bahwa data yang diperoleh adalah akurat dan dapat dipercaya.

#### **2. Member Checking**

Hasil wawancara dan observasi dikonfirmasi kembali kepada subjek penelitian untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka.

Member checking ini membantu meningkatkan validitas data.

### 3. Audit Trail

Peneliti mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara rinci, termasuk keputusan-keputusan yang diambil selama pengumpulan dan analisis data. Audit trail ini membantu memastikan bahwa penelitian dapat diulang dan hasilnya konsisten.

### Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian. Peneliti memperoleh izin dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dan memastikan bahwa partisipasi subjek penelitian adalah sukarela. Informasi yang diperoleh dari subjek penelitian dijaga kerahasiaannya, dan identitas subjek penelitian disamarkan dalam laporan penelitian untuk melindungi privasi mereka. Melalui metode etnografi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena judi online di lingkungan kerja dan efektivitas langkah-langkah preventif yang diambil oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam memberantas judi online di kalangan pegawai pemerintahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, kami melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen untuk memahami fenomena judi online di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dan menganalisis efektivitas langkah preventif yang telah diambil. Hasil dari pengumpulan data ini memberikan gambaran yang mendalam mengenai situasi di lapangan dan reaksi pegawai terhadap kebijakan pemeriksaan handphone.

#### 1. Observasi Partisipatif

Selama observasi partisipatif, peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari di kantor. Kami mengamati interaksi sosial, perilaku pegawai, serta dinamika yang terjadi di lingkungan kerja. Observasi ini dilakukan selama beberapa minggu untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.

Kami menemukan bahwa sebelum adanya kebijakan pemeriksaan handphone, beberapa pegawai terlihat sering menggunakan handphone mereka selama jam kerja. Aktivitas ini tidak selalu terkait dengan tugas pekerjaan, dan terdapat indikasi bahwa beberapa

pegawai mungkin terlibat dalam judi online. Situasi ini mempengaruhi produktivitas kerja dan suasana kerja secara keseluruhan.

Setelah kebijakan pemeriksaan handphone diterapkan, terdapat perubahan signifikan dalam perilaku pegawai. Pegawai menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan handphone mereka dan mengurangi penggunaan handphone untuk keperluan pribadi selama jam kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran pegawai tentang bahaya judi online.

### 2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan 20 pegawai dan PPNPN yang dipilih secara purposive. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang judi online, pengalaman pribadi terkait judi online, dan pandangan mereka terhadap kebijakan pemeriksaan handphone.

Dari wawancara, kami menemukan beberapa tema utama:

- **Kesadaran Bahaya Judi Online:** Sebagian besar pegawai menyadari bahaya judi online dan dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan profesional. Mereka mengakui bahwa judi online dapat menyebabkan kerugian finansial, stres, dan gangguan mental yang serius.
- **Pengalaman Pribadi:** Beberapa pegawai mengaku pernah terlibat dalam judi online dan mengalami kerugian finansial. Mereka merasa bahwa judi online sangat adiktif dan sulit untuk dihentikan. Pengalaman ini membuat mereka mendukung kebijakan pemeriksaan handphone sebagai langkah preventif.
- **Pandangan Terhadap Kebijakan Pemeriksaan Handphone:** Mayoritas pegawai mendukung kebijakan pemeriksaan handphone. Mereka merasa bahwa kebijakan ini penting untuk menjaga integritas dan produktivitas di lingkungan kerja. Namun, beberapa pegawai merasa bahwa kebijakan ini perlu disosialisasikan lebih baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

### 3. Analisis Dokumen

Analisis dokumen melibatkan penelaahan terhadap peraturan internal kantor, undang-undang terkait judi online, dan dokumen kebijakan pemeriksaan handphone. Dokumen-dokumen ini memberikan konteks hukum dan kebijakan yang mendasari langkah-langkah yang diambil oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika.

Dokumen internal kantor menunjukkan bahwa kebijakan pemeriksaan handphone adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjaga integritas dan profesionalisme pegawai. Peraturan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang melarang segala bentuk perjudian, termasuk judi online.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa aspek yang perlu dibahas lebih lanjut untuk memahami efektivitas kebijakan pemeriksaan handphone dan dampaknya terhadap lingkungan kerja di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika.

#### **1. Efektivitas Kebijakan Pemeriksaan Handphone**

Kebijakan pemeriksaan handphone yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika terbukti efektif dalam memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran pegawai tentang bahaya judi online. Observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pegawai menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan handphone mereka selama jam kerja dan mengurangi aktivitas yang tidak terkait dengan pekerjaan.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan (sumber : Facebook Kanim Timika)



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan Pemeriksaan handphone

Kebijakan ini juga berhasil mengurangi penggunaan handphone untuk keperluan pribadi, yang sebelumnya sering dilakukan oleh beberapa pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa langkah preventif seperti pemeriksaan handphone dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan bebas dari pengaruh negatif judi online.

#### **2. Kesadaran dan Pendidikan tentang Bahaya Judi Online**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pegawai tentang bahaya judi online cukup tinggi. Pegawai menyadari bahwa judi online dapat menyebabkan kerugian finansial dan gangguan mental yang serius. Namun, ada kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya judi online agar semua pegawai memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan konsisten.

Program edukatif yang komprehensif dapat membantu pegawai memahami risiko dan konsekuensi negatif dari judi online, serta memberikan strategi untuk menghindari kecanduan. Pendidikan ini harus mencakup informasi tentang konsekuensi hukum dan sosial dari terlibat dalam judi online, serta memberikan dukungan bagi pegawai yang mungkin membutuhkan bantuan untuk mengatasi kecanduan judi online.

### 3. Dampak terhadap Produktivitas dan Moral Kerja

Judi online memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap produktivitas dan moral kerja. Pegawai yang terlibat dalam judi online cenderung mengalami penurunan produktivitas, keterlambatan dalam menyelesaikan tugas, dan mengalami stres serta kelelahan mental. Hal ini tidak hanya merugikan pegawai secara individu, tetapi juga dapat mengganggu dinamika kerja tim dan mengurangi efisiensi organisasi secara keseluruhan. Kebijakan pemeriksaan handphone berhasil mengurangi aktivitas judi online di lingkungan kerja, yang pada gilirannya membantu meningkatkan produktivitas dan moral kerja. Pegawai menjadi lebih fokus pada tugas-tugas mereka dan bekerja dengan lebih efektif. Selain itu, kebijakan ini juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan profesional.

### 4. Tantangan dan Keterbatasan Kebijakan

Meskipun kebijakan pemeriksaan handphone terbukti efektif, terdapat beberapa tantangan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah perlunya sosialisasi yang lebih baik agar pegawai memahami tujuan dan pentingnya kebijakan ini. Beberapa pegawai merasa bahwa kebijakan ini perlu disosialisasikan lebih baik untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan dukungan penuh dari semua pegawai.

Selain itu, kebijakan pemeriksaan handphone mungkin tidak cukup untuk sepenuhnya memberantas judi online di lingkungan kerja. Ada kebutuhan untuk mengembangkan strategi yang lebih komprehensif, termasuk program edukatif, dukungan psikologis, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas online pegawai.

### 5. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi kebijakan dan rekomendasi yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah preventif terhadap judi online di lingkungan kerja:

- **Pengembangan Program Edukatif:** Mengembangkan program edukatif yang komprehensif tentang bahaya judi online dan cara menghindarinya. Program ini harus mencakup informasi tentang risiko finansial, kesehatan mental, dan konsekuensi hukum dari judi online.
- **Dukungan Psikologis:** Menyediakan dukungan psikologis bagi pegawai yang mungkin mengalami kecanduan judi online. Dukungan ini

dapat berupa konseling individual, kelompok dukungan, dan akses ke layanan kesehatan mental.

- **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas online pegawai dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait judi online. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk memantau dan memblokir akses ke situs judi online di lingkungan kerja.
- **Sosialisasi Kebijakan:** Meningkatkan sosialisasi kebijakan pemeriksaan handphone agar semua pegawai memahami tujuan dan pentingnya kebijakan ini. Sosialisasi yang baik akan membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan dukungan penuh dari semua pegawai.
- **Pengembangan Kebijakan Internal:** Mengembangkan kebijakan internal yang lebih komprehensif untuk memberantas judi online di lingkungan kerja. Kebijakan ini harus mencakup langkah-langkah preventif, edukatif, dan penegakan hukum yang konsisten.

### Analisis Pentingnya Kasus Ini

Kasus ini perlu ditindaklanjuti dengan serius karena judi online bukan hanya sekadar masalah pribadi yang dapat diselesaikan dengan nasihat atau peringatan. Ini adalah masalah sistemik yang merusak fondasi etika dan moral di tempat kerja. Ketika seorang pegawai terlibat dalam judi online, mereka tidak hanya menempatkan diri mereka pada risiko finansial dan psikologis, tetapi juga membahayakan reputasi dan efisiensi institusi tempat mereka bekerja. Judi online dapat mengarah pada berbagai bentuk penyimpangan profesional, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan yang merugikan seluruh organisasi.

Selain itu, toleransi terhadap judi online dapat menciptakan budaya permisif di lingkungan kerja, di mana pelanggaran etika lainnya mungkin dianggap sepele. Ini bisa memicu rantai masalah yang lebih besar, mengakibatkan kerugian jangka panjang bagi institusi dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Oleh karena itu, tindakan preventif seperti pemeriksaan handphone dan program pendidikan yang intensif sangat diperlukan untuk membangun kesadaran, menanamkan disiplin, dan memastikan bahwa pegawai tetap berpegang pada standar etika yang tinggi.

Implementasi kebijakan ini juga mencerminkan komitmen institusi terhadap penegakan hukum dan regulasi yang ada, serta menunjukkan ketegasan

dalam menjaga integritas dan profesionalisme di lingkungan kerja. Dengan memastikan bahwa setiap pegawai memahami dan mematuhi peraturan yang melarang judi online, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, aman, dan beretika. Inilah alasan utama mengapa kasus ini perlu ditindaklanjuti dengan serius dan konsisten, demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh pegawai dan institusi.

Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang fenomena judi online di lingkungan kerja dan langkah-langkah efektif yang dapat diambil untuk memberantasnya. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berintegritas tinggi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika serta instansi pemerintahan lainnya.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena judi online di lingkungan kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika serta menilai efektivitas kebijakan pemeriksaan handphone yang diterapkan sebagai langkah preventif. Berdasarkan hasil observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, ditemukan beberapa temuan utama yang memberikan wawasan mendalam tentang situasi di lapangan dan reaksi pegawai terhadap kebijakan tersebut.

Pertama, judi online di lingkungan kerja terbukti memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap produktivitas dan moral pegawai. Pegawai yang terlibat dalam judi online cenderung mengalami penurunan produktivitas, keterlambatan dalam menyelesaikan tugas, dan gangguan mental serta kesehatan fisik. Judi online juga meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan fasilitas kantor, yang dapat merusak reputasi dan integritas institusi.

Kedua, kebijakan pemeriksaan handphone yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika terbukti efektif dalam memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran pegawai tentang bahaya judi online. Observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pegawai menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan handphone mereka selama jam kerja dan mengurangi aktivitas yang tidak terkait dengan pekerjaan. Kebijakan ini juga membantu mengurangi penggunaan handphone untuk keperluan pribadi, yang sebelumnya sering dilakukan oleh beberapa pegawai.

Ketiga, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai mendukung kebijakan

pemeriksaan handphone dan menyadari pentingnya langkah ini untuk menjaga integritas dan produktivitas di lingkungan kerja. Namun, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan sosialisasi kebijakan agar pegawai memahami tujuan dan pentingnya langkah ini secara lebih mendalam dan konsisten.

Keempat, analisis dokumen menunjukkan bahwa kebijakan pemeriksaan handphone didasarkan pada peraturan dan undang-undang yang melarang segala bentuk perjudian, termasuk judi online. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan hukum yang kuat untuk mendukung langkah-langkah preventif ini.

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan keterbatasan dalam penerapan kebijakan pemeriksaan handphone. Salah satu tantangan utama adalah perlunya sosialisasi yang lebih baik agar pegawai memahami tujuan dan pentingnya kebijakan ini. Selain itu, kebijakan pemeriksaan handphone mungkin tidak cukup untuk sepenuhnya memberantas judi online di lingkungan kerja. Ada kebutuhan untuk mengembangkan strategi yang lebih komprehensif, termasuk program edukatif, dukungan psikologis, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas online pegawai.

Berdasarkan temuan ini, kami merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah preventif terhadap judi online di lingkungan kerja:

1. Mengembangkan program edukatif yang komprehensif tentang bahaya judi online dan cara menghindarinya. Program ini harus mencakup informasi tentang risiko finansial, kesehatan mental, dan konsekuensi hukum dari judi online.
2. Menyediakan dukungan psikologis bagi pegawai yang mungkin mengalami kecanduan judi online. Dukungan ini dapat berupa konseling individual, kelompok dukungan, dan akses ke layanan kesehatan mental.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas online pegawai dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait judi online. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk memantau dan memblokir akses ke situs judi online di lingkungan kerja.
4. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pemeriksaan handphone agar semua pegawai memahami tujuan dan pentingnya kebijakan ini. Sosialisasi yang baik akan membantu

menghindari kesalahpahaman dan memastikan dukungan penuh dari semua pegawai.

5. Mengembangkan kebijakan internal yang lebih komprehensif untuk memberantas judi online di lingkungan kerja. Kebijakan ini harus mencakup langkah-langkah preventif, edukatif, dan penegakan hukum yang konsisten.

Kasus ini perlu ditindaklanjuti dengan serius karena judi online bukan hanya sekadar masalah pribadi yang dapat diselesaikan dengan nasihat atau peringatan. Ini adalah masalah sistemik yang merusak fondasi etika dan moral di tempat kerja. Ketika seorang pegawai terlibat dalam judi online, mereka tidak hanya menempatkan diri mereka pada risiko finansial dan psikologis, tetapi juga membahayakan reputasi dan efisiensi institusi tempat mereka bekerja. Judi online dapat mengarah pada berbagai bentuk penyimpangan profesional, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan yang merugikan seluruh organisasi.

Dengan memastikan bahwa setiap pegawai memahami dan mematuhi peraturan yang melarang judi online, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, aman, dan beretika. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena judi online di lingkungan kerja dan langkah-langkah efektif yang dapat diambil untuk memberantasnya, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berintegritas tinggi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika serta instansi pemerintahan lainnya.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, khususnya Bapak Mohamad Agus Sofani, Bapak Samsul, Bapak Edwin, serta seluruh pegawai dan PPNPN yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing, rekan peneliti, keluarga, teman-teman, dan semua responden yang telah memberikan kontribusi berharga. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi upaya pemberantasan judi online di lingkungan kerja dan menjadi referensi bagi instansi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Muliadi, D., & Nurhasanah, N. (2020). Pengaruh judi online terhadap kesehatan mental dan

produktivitas kerja. *Jurnal Psikologi*, 12(1), 45-60.

Santosa, Y. B., & Prabowo, A. (2021). Dampak judi online terhadap perilaku pegawai negeri sipil. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 155-170.

Hidayati, R. (2022). Judi online dan dampaknya terhadap etika kerja pegawai pemerintah. *Jurnal Etika dan Hukum*, 10(3), 75-89.

Fadilah, I. (2019). Tindakan preventif dalam memberantas judi online di instansi pemerintah. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(1), 95-110.

Prasetyo, A. (2023). Peran kebijakan dalam mengurangi kecanduan judi online di kalangan pegawai. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(2), 112-128.

### Buku

Nurhadi, E. (2018). *Perjudian Online: Analisis Hukum dan Sosial*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Rahman, M. (2020). *Psikologi Kecanduan: Mengatasi Perjudian dan Dampaknya*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Iskandar, M. (2021). *Etika Kerja dan Integritas dalam Lingkungan Pemerintahan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Susilo, R. (2019). *Kesehatan Mental dan Perilaku Perjudian: Teori dan Praktik*. Malang: Penerbit UMM Press.

Sari, F. (2022). *Regulasi Perjudian Online di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

### Artikel

Fatimah, U. (2023). "Judi online di lingkungan kerja: Apa yang perlu diketahui." *Kompas*. Diakses dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com).

Andriani, L. (2022). "Dampak judi online terhadap pegawai negeri." *Detik News*. Diakses dari [www.detik.com](http://www.detik.com).

Setiawan, R. (2021). "Pemeriksaan handphone sebagai langkah preventif judi online." *Tribun News*. Diakses dari [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com).

Wibowo, A. (2022). "Kesadaran pegawai tentang bahaya judi online." *Media Indonesia*. Diakses dari [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com).

Yulianti, S. (2020). "Judi online dan dampaknya bagi kinerja pegawai." *SINDO News*. Diakses dari [www.sindonews.com](http://www.sindonews.com).

### **Sumber Daya Tambahan**

Badan Pengawas Perjudian Online. (2021). *Laporan Tahunan Pengawasan Perjudian Online di Indonesia*. Jakarta: BPP.

Dewan Perwakilan Rakyat. (2019). *Rancangan Undang-Undang tentang Perjudian*. Jakarta: DPR.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). "Regulasi untuk memerangi judi online." *Berita Resmi Kementerian*. Diakses dari [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id).

Suryani, N. (2022). "Pendidikan tentang bahaya judi online di instansi pemerintahan." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 15(4), 205-220.

Rahmawati, D. (2023). "Integritas pegawai negeri sipil dalam menghadapi judi online." *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 38-50.